



Kegiatan Kewilayahan Didesak Lebih Fokus

YOGYA (KR) - Sejak kebijakan pelimpahan sebagian wewenang kepala daerah ke kecamatan dan kelurahan pada 2012 lalu, kegiatan kewilayahan semakin semarak. Namun demikian, kegiatan tersebut seharusnya bisa lebih fokus lantaran anggaran yang dikelola cukup besar.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mencontohkan anggaran yang dikelola oleh masyarakat di kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). "Setiap tahun, Pemkot mengalokasikan dana antar Rp 80 juta hingga Rp 120 juta bagi tiap LPMK. Pemerintah pusat pun memiliki program kewilayahan yang disalurkan melalui BKM. Kalau setiap tahun kegiatannya bisa fokus, maka hasilnya pasti akan optimal," urainya, Senin (16/7).

Selain itu, pemerintah kelurahan juga memiliki alokasi anggaran yang terpisah dari LPMK maupun BKM. Jumlahnya berkisar Rp 200 juta hingga Rp 400 juta tiap kelurahan per tahun. Belum termasuk anggaran pemerintah kecamatan yang kegiatannya dilakukan di kelurahan,

besarannya mencapai Rp 500 juta per tahun.

Oleh karena itu, jika dijumlah seluruh anggaran untuk kegiatan kewilayahan di kelurahan, dalam satu tahun bisa mencapai angka miliaran rupiah. Apalagi ketika dana kelurahan dari pemerintah pusat akhirnya disetujui layaknya dana desa yang sudah diku-

curkan lebih dulu. "Dana kelurahan saat ini masih diperjuangkan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Kota Yogya membutuhkan tambahan dana kewilayahan layaknya dana desa itu," imbuhnya.

Heroe menyarankan, tiap kelurahan bisa membuat rencana pembangunan jangka menengah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. Melalui rencana pembangunan itu, maka setiap kegiatan yang digulirkan tiap

tahun bisa memiliki target dan tujuan yang terarah. Target, imbuhnya, tidak hanya berhenti di tahun pertama saja tetapi harus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya sehingga kelurahan pun mengalami perkembangan yang pesat. "Misalnya di tahun kedua fokus pada penataan lingkungan, atau infrastruktur dan dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan upaya pengentasan kemiskinan. Begitu seterusnya," paparnya. (Dhi)-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005